

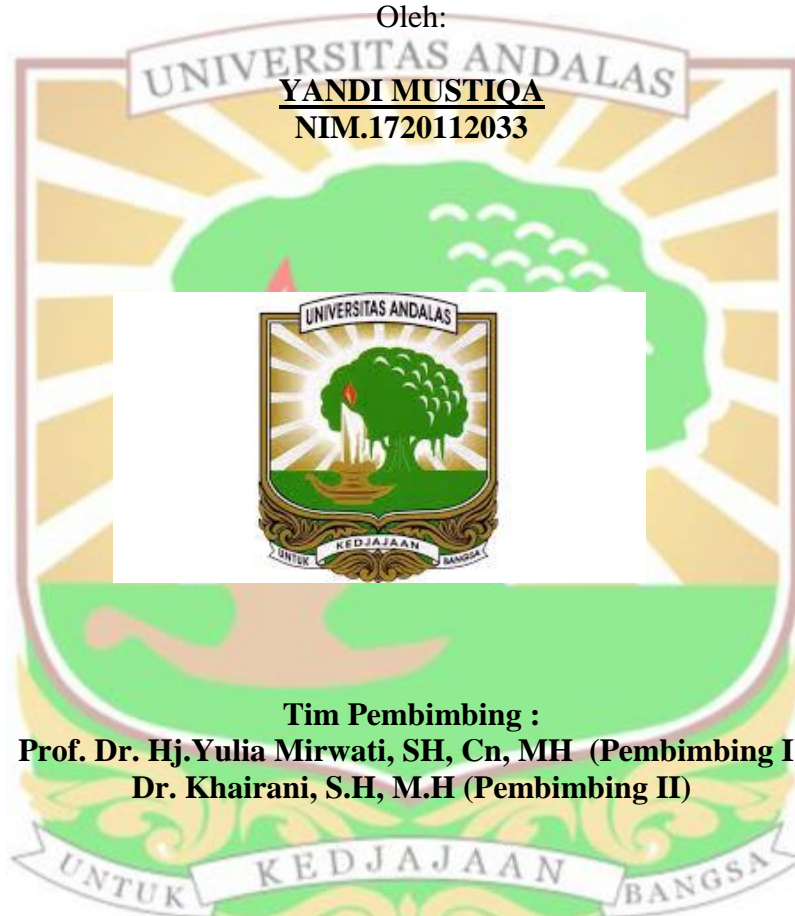
**PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA TERHADAP PELAKSANAAN
JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI
PADA PROYEK PEMERINTAH DI KOTA SOLOK SUMATERA BARAT**

Tesis

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum*

Oleh:

YANDI MUSTIQA
NIM.1720112033



Tim Pembimbing :

Prof. Dr. Hj. Yulia Mirwati, SH, Cn, MH (Pembimbing I)

Dr. Khairani, S.H, M.H (Pembimbing II)

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

**PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA TERHADAP PELAKSANAAN
JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI
PADA PROYEK PEMERINTAH DI KOTA SOLOK SUMATERA BARAT**

(Yandi Mustiqa, 1720112033, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 91 Halaman, 2020)

ABSTRAK

Jaminan Sosial diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan diatur melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pekerja berhak mendapatkan jaminan atas kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun. Dari banyaknya pekerjaan konstruksi milik pemerintah di Kota Solok, sampai dengan akhir tahun 2018 baru dilakukan pembayaran jaminan sosial bagi para pekerja sebanyak 9 kasus untuk jaminan atas kecelakaan kerja dan 2 kasus untuk jaminan atas kematian dengan total pembayaran Rp. 89.766.791,-. Dari jumlah tersebut terlihat belum maksimalnya pelaksanaan program jaminan sosial bagi para pekerja dikarenakan belum diikutsertakannya oleh para pemberi kerja walau sudah dipersyaratkan oleh Undang-Undang. Melihat kenyataan tersebut, maka dalam tesis ini diangkat persoalan terhadap bagaimana pelaksanaan perlindungan bagi para pekerja, dan hambatan-hambatan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok dalam menjalankan Program Jaminan Sosial terhadap pekerja, serta bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan perlindungan pekerja yang bekerja pada proyek konstruksi milik pemerintah di kota Solok, Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, secara langsung melihat keadaan lapangan di daerah Kota Solok dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), melakukan identifikasi (*problem-identification*) dan menuju pada penyelesaian masalah dengan hasil penelitian sebagai berikut 1) Pelaksanaan Jaminan Sosial Nasional telah dilakukan di Kota Solok oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Kota Solok sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sesuai Undang- Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Pelaksanaan Jaminan Sosial Nasional, namun pelaksanaan belum optimal ditandai dengan pembayaran jaminan sosial yang belum sebanding dengan jumlah pekerja di Kota Solok sebanyak 3.102 orang 2) Hambatan-hambatan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok dalam menjalankan Program Jaminan Sosial terhadap pekerja disebabkan karena kurang patuhnya para pemberi kerja, lemahnya pengawasan dan regulasi yang masih berpihak kepada pemberi kerja, 3) Jaksa Pengacara Negara dapat berperan dalam memberikan perlindungan tenaga kerja yang bekerja pada proyek konstruksi milik pemerintah di kota Solok melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Pengacara Negara melalui Nota Kesepahaman yang telah ada dengan BPJS dan Pemerintah Kota Solok, dan hadir dalam setiap pelaksanaan kontrak guna memastikan pencantuman klausul adanya jaminan sosial bagi para pekerja. Sehingga dapat mendorong jumlah kepesertaan dan pemberian santunan, yang pada tahun 2019 telah dibayarkan untuk pemberian santunan atas Kecelakaan Kerja sebanyak Rp. 1.842.779.600 untuk 197 kasus dan pemberian santunan atas kematian sebanyak Rp. 909.000.000,- untuk 34 kasus.

Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, Pekerja, Jaminan Sosial, Pekerjaan Konstruksi.

THE ROLE OF THE STATE ATTORNEY IN THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL SECURITY FOR WORKERS IN CONSTRUCTION WORK AT THE GOVERNMENT PROJECTS IN SOLOK WEST SUMATERA

(Yandi Mustiqah, 1720112033, Master of Law, Andalas University, 91 Pages, 2020)

ABSTRACT

Social security is regulated through the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System, the implementation of which is carried out by the Social Security Organizing Agency and regulated through Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency, the workers are entitled to insurance for health, work accident, death, old age and retirement. Until the end of 2018, Social Security Payment have been made for the workers as many as 9 cases for collateral for work accidents and 2 cases for insurance for death with a total payment of Rp. 89.766.791,-. From this number, it is seen that the implementation of the social security program for workers has not been maximized because the employers have not yet included it even though it is required by law. Seeing this fact, then in this thesis raised the issue of how the implementation of the National Social Security System, and the barriers of BPJS Ketenagakerjaan Solok in carrying out the Social Security Program for Workers, as well as the role of the State Attorney in protection workers who work on government-owned construction projects in Solok. This Research using sociological juridical methods, research by looking directly at the situation in the field in Solok with the intent and purpose of finding fact, identifying and leading to problem solving with the result of research as following 1) Implementation of the National Social Security System has been carried out in Solok by BPJS Ketenagakerjaan and BPJS Kesehatan Solok as the Organizing Agency according Law No.40 of 2004 concerning the National Social Security System but is not optimal marked by social security payments which are not yet proportional to the number of workers in Solok by 3.102 peoples 2) Obstacles of the BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok in running the Social Security Program for workers due to lack of compliance of the providers work, weak supervision and regulation that still siding with the employer 3) State Attorney can play a role in providing protection for workers who work on government-owned construction project in Solok through the Civil and Administrative Affairs sector as a State Lawyer through a Memorandum of Understanding that has been there is with BPJS and Solok City Government, and present in every implementation contract to ensure the inclusion of a social security clause for workers. So as to encourage the number of membership and compensation, which in 2019 has been paid for the provision of compensation for work accidents as much as Rp. 1.842.779.600 for 197 cases and compensation for the death of Rp. 909.000.000 for 34 cases.

Keywords : State Attorney, Workers, Social Security, Construction Work